

## ABSTRAK

Ganesha Chandra Agung (01043170115)

### **PENYEBARLUASAN GAGASAN TRANSNASIONAL HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA DAN TANGGAPAN PEMERINTAH PADA TAHUN 2017-2019**

(xv+ 208 halaman, 4 gambar, 7 lampiran)

**Kata Kunci:** Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah, Indonesia.

Penyebarluasan gagasan transnasional Hizbut Tahrir memberi dampak bagi kestabilan politik dan sosial di Indonesia. Sehingga pemerintah menanggapi hal tersebut dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran dan penyebarluasan gerakan sosial Hizbut Tahrir di Indonesia, selanjutnya tanggapan dan alasan pemerintah Indonesia untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data tersebut melalui cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pandangan teori konstruktivisme, dikarenakan teori ini mampu memberikan pemahaman serta pandangan yang kuat mengenai pemikiran, gerakan kolektif Hizbut Tahrir dan tanggapan pemerintah Indonesia.

Hizbut Tahrir merupakan gerakan sosial yang didirikan oleh Taqiyudin An-Nabhani pada tahun 1952 di Al-Quds Palestina. Hizbut Tahrir adalah gerakan yang menggunakan bendera agama dengan bergerak secara *bottom-up*, untuk bereaksi secara pemikiran dan gagasan untuk melawan kekuatan hegemoni, dengan berusaha membentuk ketertiban sosial yang baru. Solusi yang di gagas oleh Hizbut Tahrir yaitu pendirian negara khilafah untuk menegakan syariat Islam secara sepenuhnya dalam bangsa dan negara saat ini. Hizbut Tahrir berhasil meluas untuk mendirikan cabangnya di Indonesia, yang didirikan oleh M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdadi pada tahun 1982 di Bogor. Gerakan sosial ini berhasil meluas dan memberi dampak bagi kestabilan politik di Indonesia. Sehingga pemerintah membubarkannya melalui Perppu oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, dengan alasan bahwa gerakan sosial Hizbut Tahrir membahayakan keutuhan NKRI, karena bertentangan dengan Ideologi Pancasila, UUD 45, demokrasi, dan Bhineka Tunggal Ika.

**Refrensi:** 8 buku + 28 artikel jurnal + 1 tesis + 13 sumber daring + 4 wawancara

## ABSTRACT

Ganesha Chandra Agung (01043170115)

### **DISSEMINATION OF HIZBUT TAHRIR IN TRANSNATIONAL IDEAS INDONESIA AND GOVERNMENT RESPONSE IN 2017-2019**

(xv+ 208 pages, 4 figures, 7 appendices)

**Keywords:** Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah, Indonesia.

The dissemination of hizbut tahrir transnational ideas has an impact on political and social stability in Indonesia. So the government responded by disbanding Hizbut Tahrir Indonesia. Therefore, this research aims to explain the thinking and the dissemination of Hizbut Tahrir social movement in Indonesia, then the response and reason of the Indonesian government to disband the Hizbut Tahrir Indonesia community organization.

Research method conducted using qualitative descriptive method with interview and documentation data collection techniques, then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. In this study the authors used the view of constructivism theory, because this theory is able to provide a strong understanding and view of the collective thinking, movement of Hizbut Tahrir and the response of the Indonesian government.

Hizbut Tahrir is a social movement founded by Taqiyudin An-Nabhani in 1952 on Al-Quds Palestine. Hizbut Tahrir is a movement that uses religious flags by moving bottom-up, to react in thought and ideas to counter the forces of hegemony, by trying to form a new social order. Hizbut Tahrir's solution is the establishment of a caliphate state to fully enforce Islamic law in the nation and the country. Hizbut Tahrir successfully expanded to establish its branch in Indonesia, which was founded by M. Mustofa and Abdurrahman Al-Baghdadi in 1982 in Bogor. This social movement succeeded in expanding and having an impact on political stability in Indonesia. So the government dissolved it through Perppu by President Joko Widodo in 2017, on the grounds that the Hizbut Tahrir social movement endangered the integrity of the Republic of Indonesia, because it was contrary to the Ideology of Pancasila, the 45th Constitution, democracy, and Bhineka Tunggal Ika

**Reference:** 8 books + 28 journal articles + 1 Thesis + 13 websites + 4 interview